

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penelitian

Informasi pada studi ini diambil dari respons yang dikumpulkan dari kuesioner disebar kepada wajib pajak UMKM di Kota dan Kabupaten Bogor. Sebanyak 100 kuesioner dikirimkan dan semuanya dikembalikan secara lengkap, memungkinkan pengolahan 100 kuesioner. Mekanisme mengumpulkan data bisa kita lihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1. Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	100
Kuesioner yang tidak Kembali	-
Kuesioner yang Kembali	100
Kuesioner yang dapat digunakan dalam penelitian	100

Sumber : Data primer

Dari informasi dalam tabel, 100 responden dari wajib pajak UMKM di Kota dan Kabupaten Bogor menjadi subjek penelitian. Karakteristik responden seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jenis usaha, dan penghasilan dari wajib pajak UMKM di kedua wilayah akan dijabarkan selengkapnya di bawah ini.

Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Jumlah	%
Laki-laki	37	37,0
Perempuan	63	63,0
Jumlah	100	100,0

Sumber : Data primer yang diolah (2023)

Tabel 4.2 mengindikasikan bahwa mayoritas dari 100 wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota dan Kabupaten Bogor adalah perempuan, dengan jumlah 63 orang (63%), sementara laki-laki yang menjadi responden berjumlah 37 orang (37%).

Tabel 4.3. Karakteristik Responden Menurut Usia

No	Usia	Frekuensi	%
1	<20 tahun	3	3,0
2	20-30 tahun	49	49,0
3	31-40 tahun	18	18,0
4	41-50 tahun	20	20,0
5	>50 tahun	10	10,0
Jumlah		100	100,0

Sumber : Data primer yang diolah (2023)

Data table dapat disimpulkan mayoritas wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota dan Kabupaten Bogor berusia antara 20-30 tahun, mencakup 49% dari 100 responden. berdasarkan kelompok usia 41-50 tahun sebesar 20%, sementara kelompok usia <20 tahun merupakan jumlah terkecil dengan hanya 3 responden. Data ini menegaskan dominasi pelaku usaha muda atau yang masih dalam rentang usia produktif di kalangan wajib pajak di daerah tersebut.

Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	%
SD dan SMP	4	4,0
SMA	49	49,0
Diploma III	11	11,0

Sarjana (S-1)	36	36,0
Pasca Sarjana	-	-
Jumlah	100	100,0

Sumber : Data primer yang diolah (2023)

Tabel 4.4 memaparkan data dari 100 responden, yaitu wajib pajak UMKM di Kota dan Kabupaten Bogor. Mayoritas dari mereka memiliki pendidikan SMA, dengan jumlah 49 orang (49%). Responden (36%) merupakan lulusan sarjana(S-1), dan jumlah paling sedikit ada pada responden pendidikan SD dan SMP, hanya 4 orang (4%).

Tabel 4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	%
Dagang	94	94,0
Jasa	6	6,0
Jumlah	100	100,0

Sumber : Data primer yang diolah (2023)

Tabel 4.5. menjelaskan bila dari 100 responden, yakni wajib pajak UMKM di Kota dan Kabupaten Bogor diketahui sebagian besar memiliki usaha di bidang dagang yakni sebanyak 94 orang (94%) dan sisanya sebanyak 6 orang (6%) memiliki usaha di bidang jasa.

Tabel 4.6. Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan

Jenis Usaha	Jumlah	%
500 juta – 700 juta	58	58,0
701 juta – 1 milyar	29	29,0
> 1 milyar	13	13,0
Jumlah	100	100,0

Sumber : Data primer yang diolah (2023)

Tabel 4.6. menjelaskan bahwa dari 100 responden, yakni wajib pajak UMKM di Kota dan Kabupaten Bogor diketahui sebagian besar memiliki penghasilan 500 juta – 700 juta setiap tahun yakni sebanyak 58 orang (58%), diikuti wajib pajak yang memiliki penghasilan antara 701 juta – 1 milyar setiap tahun yakni sebanyak 29 orang (29%) dan wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih dari 1 milyar ada 13 orang (13%).

4.2. Analisa Data

4.2.1. Analisa Statistik Deskriptif

Analisa statistik deskriptif bertujuan untuk secara statistik menguraikan variabel-variabel yang dipakai dalam penelitian ini. Variabel-variabel tersebut meliputi tingkat penghasilan, sanksi perpajakan, kepercayaan pada pemerintah, moralitas pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Informasi mengenai rentang jawaban responden (nilai maksimum dan minimum) serta rata-rata jawaban dapat ditemukan dalam tabel berikut untuk mendeskripsikan variabel-variabel tersebut:

Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghasilan	100	1.00	3.00	1.5500	.71598
Sanksi	100	5.00	25.00	20.2300	4.32716
Kepercayaan	100	5.00	25.00	17.2500	5.10768
Moralitas Pajak	100	7.00	20.00	15.9900	3.11236
Kepatuhan	100	9.00	25.00	20.2100	3.80668
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data primer yang diolah (2023)

Tabel 4.7 disajikan statistik deskriptif variabel penelitian sebagai berikut:

1. Sanksi Perpajakan

Variabel sanksi perpajakan diukur dengan 5 (lima) pernyataan diperoleh rata-rata skor jawaban sebesar 20,23 dengan skor minimum 5 dan skor maksimum 25. Skor rata-rata sebesar 20,23 memaparkan responden dominan menjawab setuju pada di tiap pernyataan yang mengukur variabel sanksi perpajakan. Artinya bila responden atau wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) di Kota dan Kabupaten Bogor memiliki persepsi positif terhadap sanksi perpajakan.

2. Kepercayaan Pada Pemerintah

Variabel kepercayaan pada pemerintah diukur dengan 5 (lima) pernyataan diperoleh rata-rata skor jawaban sebesar 17,25 dengan skor maksimum 25 dan skor minimum 5. Skor rata-rata sebesar 17,25 yang menyatakan responden cenderung menjawab setuju pada setiap pernyataan yang mengukur variabel kepercayaan pada pemerintah Responden atau wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota dan Kabupaten Bogor memiliki persepsi yang positif terhadap kepercayaan pada pemerintah.

3. Moralitas Pajak

Variabel moralitas pajak diukur melalui 4 pernyataan, dengan rata-rata skor jawaban mencapai 15,99 dari skala 7 hingga 20. Skor rata-rata ini menunjukkan kecenderungan responden untuk menyetujui pernyataan-pernyataan yang mengukur moralitas pajak. Ini mengindikasikan bahwa para responden, khususnya wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota dan Kabupaten Bogor, memiliki sikap baik terhadap kewajiban pajak mereka.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kepatuhan wajib pajak dilakukan pengukuran melalui 5 pernyataan yang kemudian dihitung rata-rata skor jawaban sebesar 20,21. Rentang skornya bervariasi dari 9 hingga 25. Rata-rata skor sebesar itu, tampaknya responden cenderung menyetujui pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut mengindikasikan bila para responden atau wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota dan Kabupaten Bogor secara konsisten patuh dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak.

4.2.2. Uji Instrumen Data

4.2.2.1. Uji Validitas

Uji keabsahan bertujuan untuk memvalidasi penggunaan kuesioner yang akurat sebagai alat penelitian. Hasil dari pengujian keabsahan dapat ditemukan dalam tabel yang disajikan di bawah ini:

Tabel 4.8. Hasil Uji Validitas

Indikator	R	r tabel	Kriteria
X2.1	0,836	0,1966	Valid
X2.2	0,816	0,1966	Valid
X2.3	0,903	0,1966	Valid
X2.4	0,868	0,1966	Valid
X2.5	0,859	0,1966	Valid

X3.1	0,861	0,1966	Valid
X3.2	0,816	0,1966	Valid
X3.3	0,919	0,1966	Valid
X3.4	0,911	0,1966	Valid
X3.5	0,915	0,1966	Valid
Z.1	0,802	0,1966	Valid
Z.2	0,870	0,1966	Valid
Z.3	0,879	0,1966	Valid
Z.4	0,875	0,1966	Valid
Y.1	0,886	0,1966	Valid
Y.2	0,832	0,1966	Valid
Y.3	0,868	0,1966	Valid
Y.4	0,900	0,1966	Valid
Y.5	0,836	0,1966	Valid

Sumber : Data primer yang diolah (2023)

Output uji validitas dalam Tabel 4.8 memaparkan bila semua indikator mengukur variabel seperti tingkat penghasilan, sanksi perpajakan, kepercayaan pada pemerintah, moralitas pajak, dan kepatuhan wajib pajak memiliki korelasi dengan skor melebihi batas kritis ($df = N-2 = 100-2 = 98$), yaitu 0,1966. Temuan ini menegaskan bahwa semua pernyataan yang digunakan untuk mengukur faktor-faktor seperti sanksi perpajakan, kepercayaan pada pemerintah, moralitas pajak, dan kepatuhan wajib pajak dianggap valid atau dapat dipercaya.

4.2.2.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna dalam menilai seberapa dapat diandalkannya kuesioner dalam sebuah penelitian. Ini dilakukan dengan mengukur Alpha Cronbach guna mengevaluasi tingkat keandalan instrumen. Informasi tentang hasil uji reliabilitas dapat ditemukan dalam tabel yang disediakan :

Tabel 4.9. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Kriteria
Sanksi Perpajakan	0,908	Reliabel
Kepercayaan Pada Pemerintah	0,931	Reliabel
Moralitas Pajak	0,879	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,915	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah (2023)

Tabel 4.9 memaparkan bila instrumen kuesioner mempunyai tingkat keandalan yang tinggi untuk mengukur sanksi perpajakan, rasa percaya pada pemerintah, moralitas pajak, dan kepatuhan wajib pajak sebab segala variabel mempunyai tingkat Cronbach's alpha di atas 0,7.

4.2.3. Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1. Uji Normalitas

Pemeriksaan normalitas bertujuan dalam menentukan apakah data yang dipakai dalam penelitian ini mengikuti distribusi normal. Pengujian statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) digunakan untuk melakukan pengujian ini. Hasil dari pemeriksaan normalitas dapat diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.10. Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov*

	Unstandardized Residual
N	100
Kolmogorov-Smirnov Z	.425
Asymp. Sig. (2-tailed)	.994

Sumber : Data primer yang diolah (2023)

Tabel 4.10 memaparkan hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov signifikansi sebesar 0,994, menunjukkan bahwa distribusi data residual model regresi adalah **normal**.

4.2.3.2. Uji Multikolonieritas

Pengujian multikolonieritas bermaksud dalam menentukan apakah terdapat hubungan antara variabel bebas yang digunakan pada model regresi. pengujian ini memakai tingkat *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance* untuk menilai adanya korelasi. Informasi mengenai hasil pengujian multikolonieritas dapat ditemukan dalam tabel yang disajikan :

Tabel 4.11. Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	(Constant)		
	Penghasilan	.907	1.103
	Sanksi	.518	1.932
	Kepercayaan	.558	1.791
	Moralitas Pajak	.445	2.248
	Moralitas Pajak	.874	1.144
	Moralitas Pajak	.895	1.118
	Moralitas Pajak	.822	1.216

Sumber : Data primer yang diolah (2023)

Tabel 4.11, variabel-variabel seperti tingkat penghasilan, sanksi perpajakan, rasa percaya pada pemerintah, moralitas pajak, dan variabel moderasi mempunyai tingkat toleransi $>0,1$ dan VIF <10 . Ini menandakan bahwa tidak memiliki masalah multikolinearitas dalam model regresi yang dipakai.

4.2.3.3. Uji Heterokedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengidentifikasi variasi yang berbeda dalam sisa perhitungan antar pengamatan dalam model regresi. Metode Glejser digunakan untuk uji heteroskedastisitas, dan informasi hasilnya tercantum dalam tabel yang disediakan:

Tabel 4.12. Hasil Uji *Glejser*

Model	Unstandardized		Standardize		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta	d		
1 (Constant)	1.444	.681			2.121	.037
Penghasilan	.361	.156	.227		2.307	.023
Sanksi	-.015	.034	-.057		-.441	.661
Kepercayaan	-.025	.028	-.111		-.890	.376
Moralitas Pajak	-.010	.051	-.027		-.192	.848
Moral Pajak	-.027	.145	-.019		-.188	.851
Moral Pajak	.372	.195	.189		1.907	.060
Moral Pajak	.377	.190	.204		1.980	.051

Sumber : Data primer yang diolah (2023)

Tabel menunjukkan hasil uji *glejser* dimana variabel tingkat penghasilan, sanksi perpajakan, kepercayaan pada pemerintah, moralitas pajak dan variabel

moderasi memiliki nilai sig. yang menunjukkan tidak signifikan terhadap AbsRes (*absolut residual*). Artinya model regresi yang digunakan tidak terdapat masalah hetero.

4.2.4. Analisa Regresi Moderasi (Moderated Regression Analysis)

Analisa regresi moderasi berguna dalam mengevaluasi sejauh mana pengaruh penghasilan, hukuman perpajakan, dan rasa percaya pemerintah kepada kepatuhan pajak, di mana moralitas pajak memainkan peran penting sebagai faktor penentu. Hasil dari analisis regresi moderasi dapat dipaparkan seperti berikut :

Tabel 4.13. Hasil Analisis Regresi Moderasi (MRA)

Model	Unstandardized		Standardized		T	Sig.
	Coefficients		Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	3.922	1.288		3.045	.003	
Penghasilan	-.539	.296	-.101	-1.822	.072	
Sanksi	.319	.065	.363	4.928	.000	
Kepercayaan	.145	.053	.195	2.743	.007	
Moralitas Pajak	.529	.097	.433	5.445	.000	
Moralitas Pajak	-.129	.275	-.027	-.469	.640	
Moralitas Pajak	.405	.369	.062	1.099	.275	
Moralitas Pajak	-.570	.360	-.092	-1.582	.117	

Sumber : Data primer yang diolah (2023)

Dari hasil regresi diperusahaan persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = -0,101X_1 + 0,363X_2 + 0,195X_3 + 0,433Z - 0,027Mod1 + 0,062Mod2 - 0,092Mod3$$

4.2.5. Hasil Uji Goodness of Fit

4.2.5.1. Uji F

Uji F adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah semua faktor independen secara kolektif berperan signifikan terhadap variabel terikat dalam suatu analisis regresi. Informasi mengenai hasil uji F dapat ditemukan dalam tabel yang tersedia :

Tabel 4.14. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1063.650	7	151.950	37.686	.000 ^a
	Residual	370.940	92	4.032		
	Total	1434.590	99			

Sumber : Data primer yang diolah (2023)

Dalam pengujian F, terdapat nilai F-hitung senilai 30,246 dengan nilai signifikansi 0,000 (kurang dari 0,05). Dengan signifikansi rendah tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa model regresi menunjukkan kesesuaian signifikan. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, pendapatan, sanksi pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, moralitas dalam pajak, dan variabel moderasi memiliki dampak yang signifikan pada kepatuhan pajak wajib.

4.2.5.2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi diperiksa menggunakan Adjusted R² dalam penelitian ini. Informasi tentang hasil pengujian koefisien determinasi dapat ditemukan pada tabel yang tersedia :

Tabel 4.15. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.861 ^a	.741	.722	2.00797

Sumber : Data primer yang diolah (2023)

Tingkat R^2 yang telah disesuaikan sebesar 0,722 menggambarkan bahwa sekitar 72,2% variasi dalam kepatuhan wajib pajak bisa dipaparkan dengan faktor-faktor seperti tingkat penghasilan, sanksi perpajakan, kepercayaan pada pemerintah, moralitas pajak, dan variabel lainnya. Sebaliknya, sekitar 27,8% sisa variasi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang belum diidentifikasi.

4.2.6. Hasil Uji Hipotesis

Uji t dipakai dalam pengujian hipotesis dalam menilai dampak yang ditimbulkan oleh setiap variabel independen kepada variabel terikat pada model yang ada. Informasi terperinci tentang hasil uji t dapat diakses melalui tabel yang tersedia :

Tabel 4.16. Hasil Uji t

Model	Standardized		
	Beta	T	Sig.
1 (Constant)		3.045	.003
Penghasilan	-.101	-1.822	.072
Sanksi	.363	4.928	.000
Kepercayaan	.195	2.743	.007
Moralitas Pajak	.433	5.445	.000
Moralitas Pajak	-.027	-.469	.640
Moralitas Pajak	.062	1.099	.275
Moralitas Pajak	-.092	-1.582	.117

Sumber : Data primer yang diolah (2023)

1. Pengaruh Tingkat Penghasilan Kepada Kepatuhan Dalam Wajib Pajak

Pengujian hipotesis 1 diperoleh skor t hitung sebesar -1,822 dengan tingkat signifikansi senilai 0,072. Berdasarkan nilai sig. >0,05, sehingga diketahui bila tingkat penghasilan tidak mempunyai dampak signifikan kepada kepatuhan yang dimiliki wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota dan Kabupaten Bogor, sehingga hipotesis 1 pada penelitian ini **ditolak**.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Kepada Kepatuhan Dalam Wajib Pajak

Pengujian hipotesis 2 diperoleh tingkat t hitung senilai 4,928 dengan tingkat signifikansi senilai 0,000. Berdasarkan tingkat sig. < 0,05, sehingga diketahui bila hukuman perpajakan mempunyai dampak positif signifikan kepada kepatuhan yang dimiliki wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota dan Kabupaten Bogor, sehingga hipotesis 2 pada penelitian ini **diterima**.

3. Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah Kepada Kepatuhan Dalam Wajib Pajak

Pengujian hipotesis 3 diperoleh tingkat t hitung senilai 2,743 dengan tingkat signifikansi senilai 0,007. Berdasarkan nilai sig. $< 0,05$, sehingga diketahui bila kepercayaan pada pemerintah memiliki dampak positif signifikan kepada kepatuhan yang dimiliki wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota dan Kabupaten Bogor, sehingga hipotesis 3 pada penelitian ini **ditolak**.

4. Pengaruh Tingkat Penghasilan Kepada Kepatuhan Dalam Wajib Pajak dengan Moralitas Pajak Sebagai Pemoderasi

Pengujian hipotesis 4 diperoleh tingkat t hitung senilai -0,469 dengan tingkat signifikansi senilai 0,640. Nilai sig. $> 0,05$, sehingga bisa diketahui bila moralitas pajak tidaklah memberikan moderasi dampak tingkat penghasilan kepatuhan yang dimiliki wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota dan Kabupaten Bogor, sehingga hipotesis 4 pada penelitian ini **ditolak**.

5. Pengaruh Sanksi Perpajakan Kepada Kepatuhan Dalam Wajib Pajak dengan Moralitas Pajak Sebagai Pemoderasi

Pengujian hipotesis 5 diperoleh nilai t hitung senilai 1,099 dengan tingkat signifikansi senilai 0,275. Tingkat nilai sig. $> 0,05$, sehingga diketahui bila moralitas pajak tidaklah memberikan moderasi dampak sanksi perpajakan kepada tingkat patuh yang dimiliki wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota dan Kabupaten Bogor, sehingga hipotesis 5 pada penelitian ini **ditolak**.

6. Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah Kepada Kepatuhan Dalam Wajib Pajak dengan Moralitas Pajak Sebagai Pemoderasi

Hasil uji hipotesis keenam memaparkan bila nilai t hitungnya adalah -1,582, dengan tingkat signifikansi senilai 0,117. Nilai signifikansi melebihi 0,05, sehingga ditarik kesimpulan bila tidak ada pengaruh moderasi yang cukup kuat dari moralitas pajak terhadap hubungan antara keyakinan kepada pemerintahan dan kepatuhan yang dimiliki wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) Kota dan Kabupaten Bogor. Sebagai hasilnya, hipotesis keenam dalam penelitian ini haruslah **ditolak**.

4.3. Interpretasi Hasil Penelitian

4.3.1. Pengaruh Tingkatan Penghasilan Kepada Kepatuhan Dalam Wajib Pajak

Pengujian hipotesis menampilkan jika tingkat penghasilan tidak dengan signifikan memengaruhi tingkatan kepatuhan yang dimiliki wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota dan Kabupaten Bogor. Besar atau kecilnya pendapatan diperoleh tidak menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan kewajiban pajak. Tingkat pendapatan tinggi lebih bersedia untuk mematuhi serta tidak memerlukan pertimbangan khusus dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sementara wajib pajak pendapatan rendah cenderung kurang patuh terhadap tanggung jawab pajak.

4.3.2. Pengaruh Sanksi Pajak Kepada Kepatuhan Dalam Wajib Pajak

Pengujian hipotesis menampilkan jika pengaplikasian sanksi pajak yang tegas sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan yang dimiliki wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota dan Kabupaten Bogor. Sanksi diterapkan oleh pemerintah maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak dari para pengusaha. Memberlakukan sanksi kepada wajib pajak dapat memperbaiki tingkat kepatuhan. Sanksi harus diberlakukan, semakin kecil kemungkinan wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Wajib pajak menyadari risiko melanggar aturan saat menghindari pajak dan akibatnya jika tidak patuh, mereka akan cenderung lebih sedikit menghindari pajak. Sanksi pajak dapat mendorong atau menghambat niat individu untuk berperilaku sesuai dengan pajak. Pengenaan ketat bagi pelanggar akan meningkatkan moral pajak nantinya akan mempengaruhi perilaku untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Sanksi pajak mempunyai korelasi positif dengan tingkat patuh wajib pajak hasil ini sejalan dengan penelitian dilakukan sebelumnya (Darmayasa, Pariani, Pandia, 2022),

4.3.3. Pengaruh Keyakinan Kepada Pemerintahan Kepada Kepatuhan Dalam Wajib Pajak

Pengujian hipotesis menampilkan jika tingkat kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota dan Kabupaten Bogor cenderung meningkat seiring dengan peningkatan kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Ini menandakan bila semakin kokoh keyakinan wajib pajak pada pemerintah, semakin tinggi tingkat ketaatan pajak di antara pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan pendapat (Widuri, Jie, Christie, 2019) menyatakan kepatuhan wajib pajak didasarkan atas kesadaran wajib pajak untuk mematuhi atau menghindari kewajiban perpajakannya. Otoritas pajak bertindak adil, maka akan tumbuh dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Wajib pajak memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap sistem perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah, maka akan cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan tidak menghindari pajak. Hasil ini sesuai dengan konsep Teori Perilaku Terencana. Teori ini menyebutkan bahwa keyakinan pada pemerintah dianggap sebagai keyakinan normatif, yang mencakup harapan normatif dari individu terhadap pemerintah. Pemerintah menunjukkan kinerja yang dapat dipercaya, hal itu menjadi pendorong dalam bagi wajib pajak agar bisa lebih patuh pada saat membayar pajak mereka (Hussain 2020). Kepercayaan seseorang pada pemerintah dapat mengarah pada keyakinan bahwa dana pajak yang dikumpulkan akan digunakan dengan tepat oleh pemerintah, mendorong motivasi untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Penemuan ini sejalan dengan riset sebelumnya bahwa keyakinan pada pemerintah memiliki pengaruh positif serta signifikan kepada sebuah kepatuhan pajak dengan wujud uang diwajibkan Chong & Arunachalam , 2018), (Widuri, Jie, Christie, 2019),

4.3.4. Pengaruh Tingkat Penghasilan Kepada Kepatuhan Dalam Wajib Dimoderasi Moralitas Pajak

Hipotesis menampilkan jika tingkatan moralitas dalam membayar pajak tidak memberikan pengaruh dalam ikatan diantara tingkat penghasilan serta aspek kepatuhan yang dimiliki wajib pajak Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM)

Kota dan Kabupaten Bogor. Secara khusus, moralitas tidak memperkuat atau melemahkan pengaruh tingkat penghasilan kepada kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menandakan meskipun wajib pajak mempunyai pemasukan yang tinggi, moralitas mereka tidak berperan secara signifikan dalam mendorong untuk mematuhi kewajiban pajak.

4.3.5. Pengaruh Sanksi Pajak Kepada Kepatuhan yang Dimiliki Wajib Pajak Dimoderasi Moralitas Pajak

Hipotesis menampilkan jika moralitas pajak tidak berperan sebagai faktor yang mengubah dampak sanksi pajak kepada sebuah pada wajib pajak UMKM pada Kota dan Kabupaten Bogor. Moralitas tidak mampu meningkatkan atau menurunkan pengaruh yang dimiliki sanksi pajak kepada tingkatan kepatuhan yang dimiliki wajib pajak. Tingkat moralitas wajib pajak mungkin tinggi, itu tidak secara efektif mendorong untuk membayar pajak, bahkan saat dihadapkan pada sanksi pajak. yang berpendapat bahwa kepatuhan terhadap peraturan pajak merupakan hasil dari proses kognitif yang melibatkan kontrol individu (Zelmiyanti dan Suwardi, 2019). Keputusan untuk patuh terhadap aturan pajak dilandaskan kepada sikap suatu kepatuhan yang perkembangannya terjadi lewat waktu yang terus berjalan melalui kepercayaan dengan terakumulasi mengenai konsekuensi atas suatu kepatuhan dan penilaiannya. Oleh karena itu, pemeriksaan dan denda pajak hanya mungkin meningkatkan kepatuhan dalam jangka waktu singkat selama periode pemeriksaan, dan tidak dapat dianggap sebagai solusi optimal karena terdapat keterbatasan dalam jumlah pemeriksa pajak.

4.3.6. Pengaruh Sanksi Pajak Kepada Kepatuhan Dalam Wajib Pajak Dimoderasi Moralitas Pajak

Hipotesis menampilkan tidak ada pengaruh signifikan moralitas pajak terhadap keterkaitan keyakinan masyarakat kepada pemerintahan serta tingkatan kepatuhan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dalam kepatuhan pajak Kota dan Kabupaten Bogor. Kepercayaan wajib pajak pada pemerintah tinggi, moralitas mereka tidak memiliki peran krusial dalam mendorong pembayaran pajak.